

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Kemajuan perekonomian suatu bangsa yaitu dapat dilihat dari pembangunan ekonomi bangsa tersebut. Pembangunan ekonomi memiliki arti yaitu serangkaian kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membukan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarkat. Pembangunan ekonomi juga mempunyai arti yaitu pemanfaatan sumber daya yang bersifat potensial di suatu daerah untuk meningkatkan produktifitas. Sumber daya yang bersifat potensial itu sendiri yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Peningkatan produktifitas itu sendiri memiliki arti yaitu masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang bersifat potensial secara ekonomis dan dapat diproduksi secara optimal dan tidak berlebih-lebihan dari kapasitas sumber daya yang tersedia itu dengan begitu dari pemanfaatan sumber daya itu masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dari kondisi sebelumnya. Di dalam penghitungan kemjuan pembangunan ekonomi terdapat tiga indikator makro yaitu tingkat pertumbuhan (*grow rate*), tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment* ), dan kestabilan harga (*price stability*) (Mankiw, 2003)

Negara mempunyai tujuan yaitu salah satunya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi memiliki salah satu ukuran untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan nasional. Melalui pendapatan nasional dapat melihat aktivitas ekonomi negara tersebut. Didalam suatu negara mempunyai yaitu pemerintah pusat, pemerintah pusat yaitu menjabat sebagai pemangku pimpinan pusat negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya mempercepat pembangunan ekonomi, yang secara tidak langsung akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dimana, hal tersebut dapat menjadi salah satu pemacu dan pemicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan satu hal yaitu pemerintah yang mempunyai sifat adil terhadap semua

wilayahnya. Setiap pemerintah pusat di suatu negara khususnya negara berkembang akan melakukan segala macam kebijakan yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan baik perdagangan internasional ataupun perdagangan domestik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses suatu negara dalam mengembangkan pembangunan ekonomi. Apabila terjadi suatu kenaikan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut juga dalam proses kenaikan apabila terjadi suatu penurunan pertumbuhan ekonomi maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut sedang mengalami penurunan. Kegiatan dasar ekonomi yaitu memiliki fungsi yang sangat dasar yaitu mengadakan kebutuhan dasar masyarakat sebanyak mungkin agar tidak terjadi kekurangan kebutuhan yang masyarakat butuhkan, dengan dasar tersebut keberhasilan perekonomian suatu daerah yaitu kualitas kehidupan masyarakat wilayah tersebut lebih baik dari sebelumnya (S, 2008) Apabila output berkembang lebih cepat dari penduduk, output perkapita meningkat dari tahun sebelumnya dan standar kehidupan masyarakatpun meningkat (E. & Ray C, 2007).

Menurut Schumpeter dalam (Boediono, 1998) pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan peningkatan output masyarakat yang dikarenakan terdapat peningkatan pada faktor produksi yang digunakan saat memproduksi barang dan jasa dan tidak ada perbedaan dalam menggunakan teknologi tersebut. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak hanya membicarakan tentang peningkatan output masyarakat itu sendiri di dalam perekonomian, akan tetapi juga dilihat dari peningkatan perekonomian itu sendiri harus memiliki dampak yang signifikan kepada pendapatan masyarakat itu sendiri.

Menurut (Samuelson & Nordhaus, 2005) terdapat empat faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sumber Daya Alam, (3) Pembentukan Modal, (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah mempunyai fungsi dalam pembentukan modal sarana dan prasarana publik. Pembentukan modal dalam menyediakan sarana dan prasarana ini sendiri pada umumnya akan menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. SOC

di bilang sangat fundamental di sebabkan pihak swasta tidak akan mau membangun sarana prasana yang bersifat *free* publiktersebut. Akan tetapi, jika tidak ada fasilitas yang bersifat publik tersebut maka pihak swasta tidak akan menanamkan modalnya di karenakan sulitnya safrana dan prasarananya. Dengan adanya fasilitas publik yang di keluarkan oleh pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Pengeluaran pemerintah itu sendiri mempunyai hubungan yang kuat terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pengeluaran pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk membiayai fungsi *agent of development* dan melalui pengeluaran pemerintah itu sendiri dapat menghasilkan output-output yang sangat di butuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang mempunyai wewenang untuk mengatur suatu pengeluaran dan penerimaan suatu daerah dalam perekonomian setiap tahunnya, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) ataupun yang bersifat daerah yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertujuan menciptakan lapangan kerja, dan kestabilan harga. Mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang telah di rencanakan. Pengeluaran pemerintah itu sendiri seperti pengeluaran untuk kesehatan peningkatan pendidikan dan peningkatan infrastruktur. Apabila pengeluaran pemerintah seperti belanja modal itu dapat di manfaatkan dengan begitu baik maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun data menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia fluktuatif dan cenderung menurun. Bisa dilihat pada tabel 1.1 tingkat pertumbuhan dibawah ini

**Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan**

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%)
2013	5.557
2014	5.007
2015	4.876
2016	5.003
2017	5.067
2018	5.171
2019	5.02

**Sumber: World Bank, 2019 ( data Diolah )**

Pertumbuhan ekonomi yang melambat dari tahun 2010-2015 di akibatkan dari beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi global yang lambat yang fokus pada China, lalu menurunnya harga-harga komoditas, tingkat suku bunga bank Indonesia yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Dunia politik Indonesia saat tahun 2014 yaitu Pemilihan Presiden, konsumsi rumah tangga yang melemah. Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia membaik dari tahun sebelumnya sebesar 0.127 akan tetapi pertumbuhan nya tersebut tidak signifikan tidak sampai sebesar satu persen hal itu disebabkan efek perekonomian global yang sedang tidak stabil, lalu berkurangnya konsumsi rumah tangga ditambah belum kunjung stabilnya siklus investasi. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mecapai targer yang sebenarnya sudah ditetapkan sebesar 5,2% hal itu di akibatkan karena berkurangnya konsumsi rumah tangga yang condong menurun dikarenakan terjadi kenaikan tarif listrik yang membuat masyarakat membayar tarif listrik bisa dua kali lipatnya yang membuat uang untuk konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Pada tahun 2018 perekonomian hanya meningkat daritahun sebelumnya sebesar 0.104% hal itu di akibatkan oleh harga pangan yang naik dan membuat konsumsi masyarakat menjadi turun, juga disebabkan kondisi perekonomian global yang

tidak stabil seperti perekonomian China dan Amerika yang tidak baik padahal ekspor ke negara tersebut cukup besar kepada dua negara itu yang berimbas kepada perekonomian Indonesia.

**Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah**

Tahun	Total Pengeluaran Pemerintah
2013	1,650,563.70
2014	1,777,182.80
2015	1,806,515.20
2016	1,864,275.10
2017	2,007,351.80
2018	2,213,117.80
2019	2,341,570.20

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak besar sekali dari tahun awal ke tahun selanjutnya, peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun selanjutnya itu di karenakan terjadinya Inflasi dari tahu ke tahun, peningkatan pendapatan pemerintah. Peningkatan pendapatan pemerintah itu di karenakan beberapa hal yaitu 1). Peningkatan akumulasi modal, 2). Kuantitas dan kualitas SDM, 3). Perkembangan tekonologi yang digunakan serta faktor-faktor lainnya. Meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak berarti pengeluaran di semua sektor juga meningkat dari tahun ketahunnya. Dari table di atas juga kita bisa melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah, maka dapat kita lihat berarti pemerintah belum dapat memaksimalkan pengeluaran yang telah di keluarkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang masih terkendala dalam memenuhi dana untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yaitu salah

satunya dana tabungan domestik yang belum cukup untuk digunakan sebagai investasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonom. Untuk memenuhi dana yang kurang terpenuhi itu pemerintah harus mencari dana alternatif agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetap tercapai salah satu cara nya yaitu dengan mencari sumber pembiayaan dalam negeri maupun sumber pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Pemerintah untuk mendukung sumber-sumber dana tersebut agar mudah masuk ke Indonesia yaitu dengan cara membuat kebijakan yang nantinya akan saling menguntungkan untuk pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dengan bertumbuhnya iklim investasi yang terjadi di Indonesia secara sehat dan kompetitif tersebut akan dapat memicu meningkatnya investasi di Indonesia baik dalam bentuk PMA maupun dalam bentuk PMDN yang nantinya akan menguntungkan bagi Indonesia dalam pembangunan nasional. Untuk melihat perkembangan realisasi PMA dan PMDN di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Indonesia tahun 2013-2019**

Tahun	PMA		PMDN	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
2013	9.612	28.617,5	2.129	128.150,6
2014	8.885	28.529,7	1.652	156.126,2
2015	17.738	29.275,9	5.100	179.465,9
2016	25.328	28.964,1	7.514	216.306,1
2017	26.257	32.239,8	8.838	262.350,5
2018	21.972	29.307,9	10,815	328.604,92
2019	30.354	28.208,8	30.451	386.498,4

**Sumber: BKPM, 2019( data Diolah )**

Berdasarkan tabel 1.3 dapat kita ketahui bahwa selama Sembilan tahun dari 2013 sampai dengan 2019 investasi PMA dan PMDN di Indonesia bersifat

fluktuatif dan sangat cenderung meningkat. Pada investasi PMA tahun 2017 adalah tahun yang memiliki proyek terbanyak 26.257 dengan jumlah investasi sebesar 32.239,8 Triliun ditahun kemudian pada tahun 2018 investasi PMA mengalami penurunan sekitar 4000 proyek. Sedangkan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 investasi PMDN terus mengalami peningkatan, tahun 2018 adalah tahun yang memiliki proyek terbanyak sebesar 10,815 pada tahun 2018 dengan jumlah investasi sebesar 328.604.92 Triliun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti mengambil judul pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi asing, investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013- 2019. Peneliti akan mengkaji dampak pengeluaran pemerintah, investasi asing, investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung

#### **B. RumusanMasalah**

- A. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhanekonomi?
- B. Apakah ada pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhanekonomi?
- C. Apakah ada pengaruh langsung investasi dalamnegeri terhadap pertumbuhan ekonomi?
- D. Adakah pengaruh pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, penanamn modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi

#### **C. TujuanPenelitian**

- 1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhanekonomi
- 2. Untuk mengetahui pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhanekonomi
- 3. Untuk mengetahui pengaruh langsung investasidalam negeri pertumbuhan ekonomi
- 4. Untuk mengetahui pengeluaran pemerinta, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbiuhan ekonomi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan untuk kedepannya yang lebih baik, yaitu:

1. Menjadi masukan kedepan untuk pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan rakyat yang khususnya Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah dan tidak merata di Indonesia
2. Menjadi masukan untuk menambah investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yang tergolong masih rendah.

